

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kelurahan Gubeng

Evana Gusti Yanuarizta ^{1*}, Ariqah Tania Putri ², Indah Prabawati ³, Firre An Suprpto ⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674241@unesa.ac.id

Abstrak

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar serta dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya tahun 2025, jumlah penduduk Kota Surabaya diperkirakan mencapai sekitar 3,08 juta jiwa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan untuk memiliki data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pendataan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang bertujuan menyediakan basis data pembangunan yang komprehensif hingga tingkat rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran kelurahan melalui pendataan SDG's dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan sehingga tujuan "Kelurahan Tanpa Kemiskinan" dapat terwujud di Kelurahan Gubeng, Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Selain itu, kelurahan memiliki kapasitas dalam proses pendataan melalui dukungan sistem informasi, kelembagaan yang ada, serta sumber daya manusia (SDM) hingga tingkat rumah tangga sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Kelurahan Gubeng, Kemiskinan, Pendataan SGD's

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan proses yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan nilai produksi barang dan jasa, tetapi juga sebagai kemampuan suatu daerah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kualitas hidup penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya mampu menciptakan pemerataan manfaat pembangunan, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga menjangkau kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, tetapi juga perlu dikaitkan dengan sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan dan memperkecil ketimpangan sosial ekonomi masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dalam prakteknya di suatu wilayah tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi tetap dapat menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan apabila manfaat pembangunan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika distribusi

pendapatan atau pengeluaran masyarakat tidak merata, sehingga sebagian kelompok memiliki akses ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, aset produktif, layanan publik, teknologi, dan peluang ekonomi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal dapat menurunkan kemiskinan, tetapi dampaknya menjadi lebih efektif apabila disertai dengan pengurangan ketimpangan pendapatan (Agussalim et al., 2024).

Ketimpangan juga perlu dipahami sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan perubahan sektor ekonomi, urbanisasi, dan perbedaan kapasitas antarwilayah. Dalam konteks Indonesia, transformasi struktural tidak selalu menghasilkan pemerataan kesejahteraan karena wilayah yang memiliki basis ekonomi lebih kuat cenderung memperoleh manfaat pembangunan lebih besar dibandingkan wilayah lain. Perbedaan struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan akses terhadap infrastruktur dapat memperbesar ketimpangan regional maupun ketimpangan dalam wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, analisis ketimpangan pada tingkat lokal penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan makro, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat pembangunan pada masyarakat di tingkat bawah (Halim et al., 2025).

Selain ketimpangan, kemiskinan juga menjadi persoalan utama dalam pembangunan wilayah karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan tidak hanya menunjukkan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, sanitasi, transportasi, dan layanan dasar lainnya. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. Komponen kebutuhan makanan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan komponen non makanan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi (BPS, 2025).

Kemiskinan di wilayah perkotaan seringkali memiliki karakter yang lebih kompleks karena berkaitan dengan biaya hidup yang tinggi, keterbatasan akses terhadap hunian layak, pekerjaan informal, dan ketidakstabilan pendapatan. Kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahan kemiskinan yang menunjukkan seberapa jauh kondisi pengeluaran masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Penelitian mengenai kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa akses energi, infrastruktur, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kedalaman dan keparahan kemiskinan, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan perlu disusun secara multidimensional (Hardi et al., 2025).

Pendekatan multidimensional penting digunakan karena masyarakat miskin seringkali mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan secara bersamaan. Masyarakat miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kualitas tempat tinggal, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Dalam konteks rumah tangga, pekerjaan informal dapat meningkatkan kerentanan ekonomi karena pendapatan yang tidak stabil dan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja. Studi terbaru menunjukkan bahwa pekerjaan informal berkaitan dengan risiko kemiskinan multidimensional, terutama karena rumah tangga informal lebih rentan mengalami keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak (Khoiruddin et al., 2025).

Upaya pengurangan kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari akses masyarakat terhadap layanan ekonomi dan keuangan. Inklusi keuangan dapat membantu masyarakat miskin

mengakses tabungan, kredit, asuransi, pembayaran digital, dan layanan keuangan produktif yang mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga. Penelitian pada rumah tangga di Indonesia Timur menunjukkan bahwa inklusi keuangan berperan dalam menurunkan kemiskinan absolut dan kemiskinan multidimensional, terutama bagi rumah tangga yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal (Kadir et al., 2025).

Selain inklusi keuangan, akses teknologi dan internet juga dapat menjadi faktor pendukung dalam pengurangan kemiskinan. Perluasan akses internet memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, peluang kerja, layanan pendidikan, layanan keuangan digital, serta akses terhadap pasar yang lebih luas. Namun, manfaat internet tidak selalu merata karena masih terdapat perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, terutama antara kelompok berpendidikan tinggi dan rendah serta antara wilayah yang memiliki infrastruktur digital kuat dan lemah. Penelitian mengenai internet dan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa akses internet dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, meskipun dampaknya berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Yokota et al., 2025).

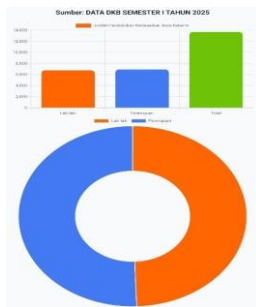
Kota Surabaya merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, pendidikan, pemerintahan, dan aktivitas ekonomi regional. Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,87 persen, dengan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp830,54 triliun dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan sebesar Rp 513,94 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Surabaya memiliki basis ekonomi yang kuat dan menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi di Jawa Timur (BPS Kota Surabaya, 2026).

Meskipun demikian, kuatnya aktivitas ekonomi perkotaan belum sepenuhnya menghapus persoalan sosial ekonomi. Data BPS Kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya pada Maret 2025 tercatat sebesar 105,09 ribu jiwa atau 3,56 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 116,62 ribu jiwa atau 3,96 persen. Namun, keberadaan penduduk miskin tetap menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan kota. Selain itu, garis kemiskinan Kota Surabaya pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 775.597 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar Rp 742.678 per kapita per bulan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengurangan kemiskinan tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan Kota Surabaya (BPS Kota Surabaya, 2025).

Persoalan ketimpangan juga perlu menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah perkotaan. Pada tingkat Provinsi Jawa Timur, Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,359, sedangkan Gini Ratio wilayah perkotaan sebesar 0,376. Untuk Kota Surabaya, Gini Ratio tahun 2025 tercatat sebesar 0,369. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan masih relevan untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Surabaya perlu dilihat tidak hanya dari capaian makroekonomi, tetapi juga dari kondisi kesejahteraan masyarakat pada tingkat wilayah yang lebih kecil (BPS Provinsi Jawa Timur, 2026).

Pada skala lokal, Kelurahan Gubeng di Kota Surabaya menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Kelurahan Gubeng terdiri atas 4 RW dan 45 RT, sehingga menunjukkan struktur permukiman perkotaan yang cukup padat dan kompleks. Keberagaman penduduk berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan agama memperlihatkan bahwa Kelurahan Gubeng memiliki dinamika sosial ekonomi yang dapat

mempengaruhi kondisi ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Analisis pada tingkat kelurahan penting dilakukan karena persoalan sosial ekonomi seringkali lebih jelas terlihat pada skala mikro dibandingkan pada skala kota secara keseluruhan (BPS Kota Surabaya, 2017).

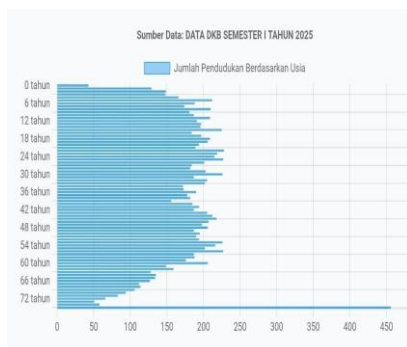


Gambar 1. Jumlah penduduk

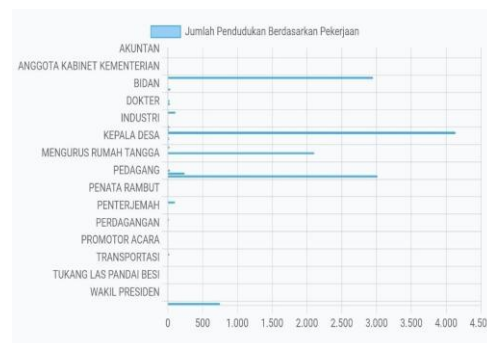


Gambar 2. Peta kemiskinan

Gambar 1 menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Gubeng, sedangkan Gambar 2 menunjukkan peta kemiskinan di wilayah tersebut. Kedua gambar ini penting untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data jumlah penduduk dapat digunakan untuk memahami beban demografis, potensi sumber daya manusia, dan kebutuhan pelayanan dasar, sedangkan peta kemiskinan dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan prioritas intervensi kebijakan. Kajian mengenai ketimpangan spasial menunjukkan bahwa kedekatan wilayah dengan pusat pertumbuhan tidak selalu menjamin pemerataan akses terhadap layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, sehingga analisis berbasis wilayah menjadi penting dalam perencanaan pembangunan lokal (Sjaf et al., 2025).

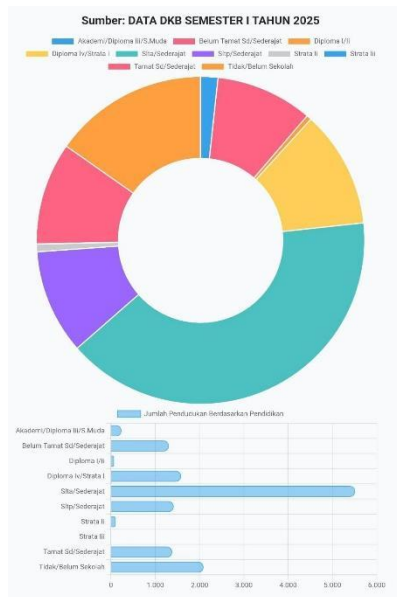


Gambar 3. Jumlah penduduk berdasarkan usia

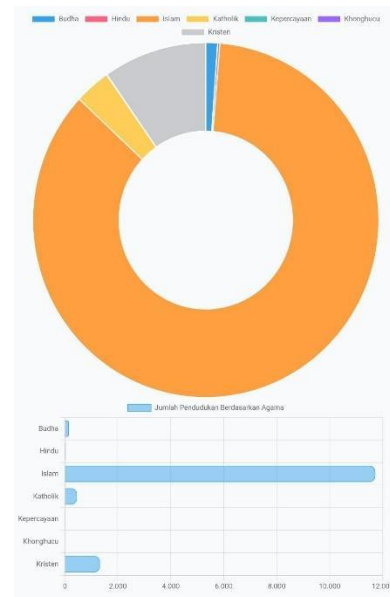


Gambar 4. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Gambar 3 memperlihatkan komposisi penduduk berdasarkan usia, sedangkan Gambar 4 menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Komposisi usia penting untuk mengetahui struktur penduduk produktif dan nonproduktif, sementara data pekerjaan dapat menggambarkan sumber pendapatan masyarakat. Apabila sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal atau memiliki pekerjaan dengan pendapatan tidak tetap, maka potensi kerentanan ekonomi akan semakin tinggi. Kondisi ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa struktur pekerjaan dan akses terhadap kesempatan ekonomi merupakan faktor penting dalam memahami kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat (Khoiruddin et al., 2025; Halim et al., 2025).



Gambar 5. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan



Gambar 6. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Gambar 5 menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, sedangkan Gambar 6 menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama. Data pendidikan penting karena tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup. Sementara itu, data agama menggambarkan keberagaman sosial masyarakat yang perlu diperhatikan dalam perumusan program pembangunan berbasis komunitas. Keberagaman sosial dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan apabila dikelola melalui pendekatan partisipatif dan inklusif, terutama dalam pelaksanaan program pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (Nugroho et al., 2021; Surtiari et al., 2024).

Pembangunan wilayah, pengurangan kemiskinan juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan konektivitas. Infrastruktur dapat memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses terhadap pusat ekonomi, memperluas peluang kerja, dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Studi mengenai pembangunan Jembatan Suramadu menunjukkan bahwa infrastruktur dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, meskipun dampaknya dapat berbeda antarwilayah dan memerlukan waktu sebelum manfaatnya dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Temuan ini memperkuat pentingnya kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur benar-benar meningkatkan akses ekonomi masyarakat miskin dan rentan (Heriqbaldi et al., 2025).

Perspektif kebijakan publik, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai isu yang perlu masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis proses masuknya suatu isu ke dalam agenda kebijakan adalah Teori Multiple Streams dari John W. Kingdon. Teori ini menjelaskan bahwa suatu isu dapat memperoleh perhatian pembuat kebijakan apabila terjadi pertemuan antara tiga aliran utama, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream* (Kingdon, 2014).

Problem stream berkaitan dengan bagaimana suatu masalah dikenali sebagai persoalan publik, misalnya melalui data kemiskinan, ketimpangan pendapatan, atau keluhan masyarakat. *Policy stream* berkaitan dengan ketersediaan alternatif solusi atau rancangan kebijakan yang

dianggap layak untuk menjawab masalah tersebut. Sementara itu, *politics stream* berkaitan dengan dukungan politik, perhatian pemerintah, opini publik, serta kondisi kelembagaan yang memungkinkan suatu isu memperoleh prioritas dalam agenda kebijakan. Ketika ketiga aliran tersebut bertemu, maka terbuka *policy window* yang memungkinkan suatu masalah masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah (DeLeo et al., 2024).

Dalam konteks Kelurahan Gubeng, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat diposisikan sebagai bagian dari *problem stream* karena keduanya menunjukkan adanya persoalan sosial ekonomi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah. Alternatif kebijakan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan layanan sosial dapat dipahami sebagai bagian dari *policy stream*. Sementara itu, dukungan pemerintah kota, pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal menjadi bagian dari *politics stream* yang dapat mendorong isu ketimpangan dan kemiskinan masuk ke dalam agenda pembangunan yang lebih inklusif. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi tantangan ketepatan sasaran, keterpaduan antar program, dan efektivitas implementasi, sehingga diperlukan perumusan kebijakan berbasis data dan karakteristik wilayah lokal (Nugroho et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Gubeng, Kota Surabaya. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga melihat bagaimana isu ketimpangan dan kemiskinan dapat dipahami dalam kerangka kebijakan publik. Dengan menggunakan Teori Multiple Streams, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana masalah ketimpangan dan kemiskinan di tingkat kelurahan dapat diidentifikasi, dirumuskan, dan diarahkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat lokal (Kingdon, 2014; DeLeo et al., 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan keterkaitan antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data sekunder serta kajian teoritis yang relevan. Metode studi literatur digunakan untuk menelaah berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi di Kota Surabaya, khususnya di Kelurahan Gubeng.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dokumen kebijakan, publikasi Badan Pusat Statistik, serta sumber resmi lain yang relevan. Data yang dikaji meliputi informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, struktur usia, pekerjaan, pendidikan, agama, serta peta kemiskinan di wilayah penelitian. Penggunaan data sekunder dilakukan karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung kepada masyarakat, tetapi berfokus pada penelusuran, pengolahan, dan interpretasi informasi yang telah tersedia dari sumber yang kredibel.

Lokasi kajian dalam penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Gubeng, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Kelurahan Gubeng sebagai wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial ekonomi beragam. Keberagaman tersebut terlihat dari komposisi penduduk berdasarkan usia, pekerjaan, pendidikan, dan agama, serta adanya sebaran kemiskinan pada tingkat wilayah. Dengan demikian, Kelurahan Gubeng dipandang relevan untuk dikaji dalam konteks ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi pada skala lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen atau studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian melakukan seleksi terhadap sumber yang memiliki relevansi dengan fokus kajian. Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, keterbaruan data, kredibilitas penerbit, serta keterkaitannya dengan isu ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Data dari BPS dan sumber resmi digunakan untuk memperkuat gambaran empiris, sedangkan jurnal ilmiah dan buku referensi digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan pembahasan akademik.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara membaca, mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber. Tahapan analisis dimulai dari identifikasi data mengenai kondisi sosial ekonomi Kelurahan Gubeng, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan hubungan antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hasil analisis dikaitkan dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini, analisis tidak diarahkan untuk menguji pengaruh secara statistik, melainkan untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel secara deskriptif berdasarkan data dan literatur yang tersedia. Oleh karena itu, istilah yang digunakan lebih tepat adalah “keterkaitan” atau “hubungan konseptual” antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, bukan “pengaruh” dalam makna kausal-kuantitatif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Kelurahan Gubeng serta relevansinya terhadap agenda pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Kota Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui telaah data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, data Kelurahan Gubeng, dokumen kebijakan pemerintah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta respons kebijakan publik di Kota Surabaya, khususnya pada konteks Kelurahan Gubeng. Hasil kajian menunjukkan bahwa Surabaya memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, tetapi persoalan ketimpangan dan kemiskinan masih perlu diperhatikan karena manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya tersebar merata kepada seluruh kelompok masyarakat.

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya memiliki aktivitas ekonomi yang kuat pada sektor perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan pemerintahan. Berdasarkan data BPS Kota

Surabaya, perekonomian Surabaya tahun 2025 tumbuh sebesar 5,87 persen, dengan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp830,54 triliun dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan sebesar Rp 513,94 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa Surabaya memiliki kapasitas ekonomi yang besar dan berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (BPS Kota Surabaya, 2026).

Pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan, pertumbuhan ekonomi perlu dikaji bersama indikator sosial lain seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, struktur pekerjaan, pendidikan, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan, tetapi pengaruh tersebut akan lebih efektif apabila disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan (Agussalim et al., 2024).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya perlu dibaca secara lebih kritis. Pertumbuhan sebesar 5,87 persen menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kota berkembang, tetapi keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari angka pertumbuhan. Pembangunan ekonomi yang berkualitas harus mampu menciptakan akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin, pekerja informal, dan rumah tangga rentan. Apabila pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan fenomena *growth without equity*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan hasil kajian data sekunder

Aspek Kajian	Temuan Utama	Makna Analitis
Pertumbuhan ekonomi Surabaya	Ekonomi Surabaya tahun 2025 tumbuh 5,87 persen	Surabaya memiliki kapasitas ekonomi kuat, tetapi tetap perlu dikaitkan dengan pemerataan kesejahteraan
Kemiskinan Surabaya	Penduduk miskin Maret 2025 sebesar 105,09 ribu jiwa atau 3,56 persen	Kemiskinan menurun, tetapi masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan
Garis kemiskinan Surabaya	Garis kemiskinan Maret 2025 sebesar Rp775.597 per kapita per bulan	Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya kebutuhan minimum masyarakat perkotaan
Ketimpangan Jawa Timur dan Surabaya	Gini Ratio Jawa Timur September 2025 sebesar 0,359; Gini Ratio perkotaan sebesar 0,376; Gini Ratio Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 0,369	Ketimpangan masih perlu dicermati, terutama dalam konteks wilayah perkotaan
Kondisi lokal Kelurahan Gubeng	Penduduk sekitar 13.692 jiwa dengan keragaman usia, pendidikan, pekerjaan, dan agama	Struktur sosial ekonomi yang beragam dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan dan ketimpangan pada tingkat lokal
Kebijakan pengentasan kemiskinan	Program padat karya dan pendataan berbasis wilayah digunakan sebagai instrumen intervensi	Efektivitas kebijakan bergantung pada ketepatan data, koordinasi lembaga, dan pelaksanaan di lapangan

Sumber: BPS Kota Surabaya, BPS Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan data Kelurahan Gubeng, diolah peneliti.

Ketimpangan Pendapatan dan Pemerataan Hasil Pembangunan

Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi isu penting dalam pembangunan wilayah perkotaan. Ketimpangan dapat terjadi ketika sebagian masyarakat memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi, sedangkan kelompok lain tetap berada dalam kondisi pendapatan rendah dan akses ekonomi terbatas. Pada tingkat Provinsi Jawa

Timur, Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,359, sedangkan Gini Ratio wilayah perkotaan sebesar 0,376. Data BPS juga menunjukkan bahwa Gini Ratio Kota Surabaya tahun 2025 tercatat sebesar 0,369. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan masih perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan (BPS Provinsi Jawa Timur, 2026).

Ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan dapat dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap pendidikan, keterampilan, pekerjaan formal, aset ekonomi, modal usaha, serta jaringan sosial. Masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan akses terhadap pekerjaan formal cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan stabil. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan rendah dan bekerja pada sektor informal lebih rentan mengalami ketidakstabilan pendapatan. Studi Khoiruddin et al. menunjukkan bahwa pekerjaan informal berkaitan dengan risiko kemiskinan multidimensional karena pekerja informal umumnya memiliki pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas (Khoiruddin et al., 2025).

Dalam konteks Surabaya, ketimpangan tidak dapat dilepaskan dari karakter kota sebagai pusat aktivitas ekonomi. Sektor perdagangan, jasa, industri, dan usaha perkotaan memang menciptakan peluang ekonomi, tetapi tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses peluang tersebut. Sebagian masyarakat mampu masuk ke sektor ekonomi produktif, sedangkan sebagian lainnya masih bergantung pada pekerjaan informal, usaha kecil, atau pekerjaan tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu disertai kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan dukungan modal usaha.

Ketimpangan juga dapat dipahami sebagai persoalan struktural. Perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor modern seringkali menghasilkan manfaat yang tidak merata karena kelompok masyarakat dengan keterampilan rendah lebih sulit menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja baru. Penelitian Halim et al. menunjukkan bahwa transformasi struktural di Indonesia dapat mempengaruhi ketimpangan regional karena wilayah dan kelompok masyarakat yang lebih siap akan memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan kelompok yang tertinggal (Halim et al., 2025).

Kondisi Kemiskinan Kota Surabaya dan Kelurahan Gubeng

Hasil telaah data menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Surabaya mengalami penurunan, tetapi belum sepenuhnya hilang. BPS Kota Surabaya mencatat bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 105,09 ribu jiwa atau 3,56 persen. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 116,62 ribu jiwa atau 3,96 persen. Garis kemiskinan Kota Surabaya pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp775.597 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar Rp742.678 per kapita per bulan (BPS Kota Surabaya, 2025).

Penurunan angka kemiskinan menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan sosial ekonomi Kota Surabaya. Namun, kenaikan garis kemiskinan juga menunjukkan bahwa kebutuhan minimum masyarakat perkotaan semakin meningkat. Kondisi ini penting diperhatikan karena masyarakat miskin perkotaan menghadapi tekanan biaya hidup yang relatif tinggi, terutama pada kebutuhan pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, penurunan persentase kemiskinan tetap perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

Pada tingkat lokal, Kelurahan Gubeng menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, Kelurahan Gubeng memiliki jumlah

penduduk sekitar 13.692 jiwa dengan komposisi masyarakat yang bervariasi berdasarkan usia, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa Gubeng memiliki karakter sosial ekonomi perkotaan yang kompleks. Meskipun berada di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi, masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, khususnya masyarakat yang bekerja pada sektor informal, memiliki pendapatan tidak tetap, atau memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak.

Kondisi kemiskinan di Kelurahan Gubeng perlu dipahami tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari aspek pendidikan, pekerjaan, akses layanan dasar, dan kualitas lingkungan sosial ekonomi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan formal dan berpendapatan tetap. Sementara itu, masyarakat yang bekerja pada sektor informal lebih rentan mengalami penurunan pendapatan ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hardi et al. yang menegaskan bahwa kemiskinan perlu dianalisis melalui aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan, termasuk dengan memperhatikan faktor urbanisasi, ketimpangan pendapatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi (Hardi et al., 2025).

Dengan demikian, kemiskinan di Kelurahan Gubeng tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi. Permasalahan kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai hasil dari keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan layak, pendidikan, layanan keuangan, serta program pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan pada tingkat kelurahan perlu diarahkan pada intervensi yang lebih spesifik berdasarkan kondisi kelompok masyarakat sasaran.

Peran Pendataan SDGs dan Program Pengentasan Kemiskinan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendataan berbasis wilayah memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Pendataan Sustainable Development Goals atau SDGs pada tingkat lokal dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan hingga tingkat rumah tangga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok miskin, kelompok rentan, kondisi pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan intervensi kebijakan. Dengan data yang lebih rinci, kebijakan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Pendataan SDGs juga dapat memperkuat proses perencanaan pembangunan kelurahan. Dalam konteks Kelurahan Gubeng, data jumlah penduduk, peta kemiskinan, komposisi usia, pekerjaan, pendidikan, dan agama dapat digunakan untuk membaca kebutuhan masyarakat secara lebih spesifik. Data pekerjaan dapat membantu mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan pelatihan kerja atau pemberdayaan usaha. Data pendidikan dapat digunakan untuk melihat kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, peta kemiskinan dapat membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas intervensi.

Namun, pemanfaatan data dalam kebijakan pengentasan kemiskinan masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data, belum optimalnya integrasi sistem data antarinstansi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya efektif. Penelitian Nugroho et al. menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterpaduan program, dan efektivitas implementasi, sehingga perbaikan tata kelola data menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi kebijakan kemiskinan (Nugroho et al., 2021).

Salah satu contoh kebijakan yang relevan dengan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya adalah Program Padat Karya. Program ini diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli, dan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan bahwa Program Padat Karya memiliki skema pemberdayaan masyarakat, termasuk pelibatan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi dan usaha mikro. Program ini juga dikaitkan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan di Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2024).

Program Padat Karya dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan yang berusaha menjawab keterbatasan akses pekerjaan bagi masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, program ini perlu diperkuat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses permodalan, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Penelitian Kadir et al. menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat membantu menurunkan kemiskinan absolut dan multidimensional, sehingga program pemberdayaan masyarakat sebaiknya tidak hanya menciptakan pekerjaan sementara, tetapi juga membuka akses terhadap layanan keuangan produktif (Kadir et al., 2025).

Selain inklusi keuangan, pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung pengentasan kemiskinan. Akses internet dapat memperluas informasi pekerjaan, pemasaran usaha kecil, pendidikan, dan layanan keuangan digital. Namun, manfaat teknologi hanya dapat dirasakan apabila masyarakat memiliki literasi digital dan akses infrastruktur yang memadai. Penelitian Yokota et al. menunjukkan bahwa penggunaan internet berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia, tetapi dampaknya dapat berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok masyarakat (Yokota et al., 2025).

Hubungan Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil kajian, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada pemerataan akses terhadap peluang ekonomi tersebut (Hamza, 2022; Ernawati, 2022). Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka ketimpangan pendapatan akan tetap tinggi dan sebagian masyarakat tetap berada dalam kemiskinan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu cukup untuk mengurangi kemiskinan apabila tidak diikuti pemerataan distribusi hasil pembangunan (Aprilianti, 2022).

Ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya produktif (Chaerul, 2023). Masyarakat miskin atau rentan seringkali memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, keterampilan, modal, pekerjaan layak, dan layanan dasar. Keterbatasan tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat, sehingga kontribusi mereka terhadap kegiatan ekonomi juga terbatas (Ernawati, 2022). Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi wilayah (Hamza, 2022).

Kemiskinan juga berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Rumah tangga miskin cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga memiliki ruang terbatas untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, atau usaha produktif. Akibatnya, masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan apabila tidak ada intervensi kebijakan yang tepat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan ekonomi

harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga pada penciptaan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks Kelurahan Gubeng, hubungan antara ketimpangan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi terlihat dari adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Wilayah ini berada di tengah aktivitas ekonomi Kota Surabaya, tetapi masih memiliki kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedekatan dengan pusat ekonomi tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan. Penelitian Sjaf et al. menegaskan bahwa ketimpangan spasial dapat terjadi ketika akses terhadap layanan, infrastruktur, dan peluang ekonomi tidak tersebar secara merata, sehingga analisis berbasis wilayah menjadi penting dalam pembangunan lokal (Sjaf et al., 2025).

Oleh karena itu, hasil kajian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan belum optimalnya pemerataan manfaat pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Surabaya yang relatif tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan tersebut dapat mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, perluasan akses usaha mikro, penguatan perlindungan sosial, dan pemanfaatan data kemiskinan yang lebih akurat.

Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Multiple Streams

Hasil pembahasan juga dianalisis menggunakan Teori Multiple Streams dari John W. Kingdon. Teori ini menjelaskan bahwa suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan apabila terjadi pertemuan antara tiga aliran utama, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*. Dalam penelitian ini, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Kelurahan Gubeng dapat dipahami sebagai bagian dari *problem stream* karena keduanya menunjukkan adanya persoalan sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Problem stream terlihat dari masih adanya penduduk miskin di Kota Surabaya, adanya ketimpangan pendapatan, serta keberagaman kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Gubeng. Data kemiskinan, Gini Ratio, struktur pekerjaan, dan peta kemiskinan menjadi indikator bahwa persoalan tersebut bukan hanya bersifat individual, tetapi merupakan masalah publik yang memerlukan intervensi kebijakan. Dengan demikian, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berperan penting dalam membuktikan keberadaan masalah dan memperkuat dasar penyusunan kebijakan.

Policy stream terlihat dari adanya berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Alternatif tersebut mencakup pendataan SDGs, program padat karya, pemberdayaan usaha mikro, pelatihan kerja, bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, serta perluasan inklusi keuangan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas data, integrasi program, dan kapasitas pelaksanaan di tingkat lokal.

Politics stream berkaitan dengan dukungan politik, komitmen pemerintah daerah, serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Surabaya, komitmen pemerintah daerah terlihat dari pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk Padat Karya dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan data, mengoordinasikan perangkat daerah, dan memastikan bahwa program benar-benar menjangkau kelompok sasaran.

Pertemuan antara *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream* membuka peluang terbentuknya *policy window*. Dalam konteks Kelurahan Gubeng, *policy window* dapat terbuka ketika data kemiskinan dan ketimpangan tersedia, alternatif kebijakan telah disiapkan, dan pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan intervensi. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan lokal yang lebih tepat sasaran, terutama melalui penguatan pendataan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Secara kritis, hasil pembahasan menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan dan kemiskinan di Kelurahan Gubeng tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih banyak berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang relatif tinggi belum sepenuhnya menjamin bahwa seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada model pertumbuhan inklusif yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, memperkuat perlindungan sosial, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan bukan hanya ketersediaan program, tetapi juga efektivitas implementasi di lapangan. Kurangnya integrasi data, keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan belum optimalnya pemanfaatan data SDGs dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi melalui penguatan data sosial ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pekerjaan layak, serta perbaikan tata kelola kebijakan publik. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pengentasan kemiskinan di Kelurahan Gubeng diharapkan tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, termasuk di Kelurahan Gubeng, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan pendapatan dan kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gubeng yang beragam, terutama dalam aspek pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap peluang ekonomi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif.

Pendataan SDGs menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan karena mampu menyediakan data yang lebih rinci hingga tingkat rumah tangga. Namun, pemanfaatan data tersebut masih perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Dalam perspektif kebijakan publik, ketimpangan dan kemiskinan di Kelurahan Gubeng telah menjadi isu yang perlu ditangani melalui kebijakan yang terarah, konsisten, dan berbasis data. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemerataan hasil pembangunan melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, pekerjaan layak, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, integrasi data antar instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat perlu diperkuat agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber sehingga belum mampu

menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Gubeng secara lebih mendalam berdasarkan data primer. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) dengan memanfaatkan data primer melalui survei atau wawancara sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

Acknowledgment

-

References

- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The path to poverty reduction: How do economic growth and fiscal policy influence poverty through inequality in Indonesia? *Economies*, 12(12), Article 316. <https://doi.org/10.3390/economies12120316>
- Aprilianti, A. A. A. (2022). The role of the Family Hope Program (PKH) in improving the economy of the poor in Renggeang Village, Limboro District Polewali Mandar Regency. *Income Journal of Economics Development*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.54065/ijed.2.1.2022.90>
- Badan Pusat Statistik. (2025, 2 Mei). *Memahami perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS*. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2017). *Jumlah RT/RW Kecamatan Gubeng menurut kelurahan tahun 2017*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTkxlzE%3D/jumlah-rt-rw-kecamatan-gubeng-menurut-kelurahan-tahun-2017>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025, 22 September). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 3,56 persen*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/22/359/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-3-56-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2026, 27 Februari). *Ekonomi Surabaya tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,87 persen*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/27/380/ekonomi-surabaya-tahun-2025-mengalami-pertumbuhan-sebesar-5-87-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026, 5 Februari). *Gini Ratio September 2025 Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 0,359*. <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1543/gini-ratio-september-2025-provinsi-jawa-timur-tercatat-sebesar-0-359.html>
- Chaerul. (2023). Influence amount resident, level education and unemployment against poverty in Regency Pangkajene and Island. *Income Journal of Economics Development*, 3(2), 61–65. <https://doi.org/10.54065/ijed.3.2.2023.176>
- DeLeo, R. A., Zohlnhöfer, R., & Zahariadis, N. (2024). *Multiple streams and policy ambiguity*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009397926>

- Ernawati, E. (2022). Factors affecting community economic welfare in Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency. *Income Journal of Economics Development*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.54065/ijed.2.1.2022.91>
- Halim, P. R., Yusuf, A. A., Sumner, A., & Purnagunawan, R. M. (2025). Structural transformation and regional inequality differential in Indonesia. *Regional Studies, Regional Science*, 12(1), 790–815. <https://doi.org/10.1080/21681376.2025.2565318>
- Hardi, I., Kurniawan, R., Ray, S., Idroes, G. M., Noviandy, T. R., & Majid, M. S. A. (2025). Reducing the poverty gap and severity in Indonesia: The role of renewable energy access and consumption. *Human Settlements and Sustainability*, 1(3), 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.hssust.2025.06.001>
- Hamza, N. S. (2022). Analysis of economic growth and potential sector development in the Wajo Regency Region. *Income Journal of Economics Development*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.54065/ijed.2.2.2022.95>
- Heriqbaldi, U., Wardana, W. W., Jamil, I. R., Basconcillo, J. A. Q., & Taniu, S. (2025). Bridging the gap: The impact of Suramadu Bridge provision on poverty reduction in Madura Island, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, Article 101740. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101740>
- Herweg, N., Zahariadis, N., & Zohlnhöfer, R. (2023). The multiple streams framework: Foundations, refinements, and empirical applications. In C. M. Weible (Ed.), *Theories of the policy process* (5th ed., pp. 29–64). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003308201-3>
- Hung, J. (2024). Sociological and policy examination of poverty-led crime in Indonesia: Case study of child prostitution. *Journal of Poverty*. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2379766>
- Kadir, R. D., Wahyudi, S. T., Maski, G., & Sumantri, V. D. S. (2025). The role of financial inclusion in reducing household poverty: Insights from Eastern Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 13(1), Article 2588925. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2588925>
- Khoiruddin, M. A., Suman, A., Prasetyia, F., Susilo, & Yuniashri, E. (2025). Informality and multidimensional child poverty: Evidence from urban and rural Indonesia. *Development Studies Research*, 12(1), Article 2533852. <https://doi.org/10.1080/21665095.2025.2533852>
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Pearson.
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- OECD. (2024). *Inclusive growth*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024, 8 Desember). *Surabaya catat penurunan drastis TPT dan kemiskinan berkat Program Padat Karya*. <https://surabaya.go.id/id/berita/23199/surabaya-catat-penurunan-drastis-tpt-dan-kemiskinan-berkat-program-padat-karya>

- Saka, A. N. A., Gan, C., & Hu, B. (2025). Financial inclusion, poverty, and income inequality. *Cogent Economics & Finance*, 13(1), Article 2587236. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2587236>
- Sjaf, S., Malik, A., Sampean, Harits, A., Maulana, S. A. B., Hakim, L., Arsyad, A. A., Gandi, R., Barlan, Z. A., Muhammad, B., Elson, L., & Cakrawinata, F. (2025). Analysis of spatial inequality and rural development in the supporting region for Nusantara Capital City, Indonesia. *Wellbeing, Space and Society*, 9, Article 100286. <https://doi.org/10.1016/j.wss.2025.100286>
- Surtiari, G. A. K., Wannewitz, M., Prasetyoputra, P., Hadumaon Siagian, T., & Garschagen, M. (2024). Indonesia's social protection system: The relevance of informal social protection to strengthen adaptation to climate change. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 21(1), Article 2375995. <https://doi.org/10.1080/1943815X.2024.2375995>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- OPHI & UNDP. (2025). *Global multidimensional poverty index 2025: Overlapping hardships: Poverty and climate hazards*. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford, and United Nations Development Programme.
- Yokota, K., Komaki, Y., Komori, A., Nagasawa, S., & Okuaki, S. (2025). The internet and poverty alleviation in Indonesia: Urban-rural disparities in a dual economy. *Journal of Asian Economics*, 100, Article 102024. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2025.102024>